BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi bersamaan dengan digulirkannya Era Otonomi daerah respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat OTONOM, artinya daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, namun berdasarkan pasal 9 ayat 2 kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.

Karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61 dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang

disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, dinas pendidikan provinsi jawa barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut beberapa perubahan baru dan dan penyesuaian dan pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsisebagai daerah otonom serta peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah dinas provinsi Jawa Barat kemudian di sesuaikan kembalin dengan ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas pendidikan provinsi Jawa Barat merupakan penggabungan dari kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional jawa barat yang berkantor di jalan Dr.Radjiman No 06 Bandung dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28

Bandung. Sesuai dengan kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di Tetapkan Di Jalan Dr.Radjiman No.06 Bandung.

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (DISDIK JABAR) adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat. DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu DISDIK JABAR mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendidikan.
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan.
c. Pembinaan manajemen dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, dikmenjur, pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah serta UPTD.
d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

3.1.2.1 Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pendidikan Jawa Barat adalah Akserasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak Mulia Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera.

3.1.2.2 Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu.

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya *Good Governance* Bidang Pendidikan.
2. Meningkatkan Upaya-upaya Pemerataan Dan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan Secara Efisien Dan Efektif. (Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

3.1.3 Moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu instansi yang berada dibawah naungan Provinsi Jawa Barat, maka moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sama seperti halnya moto Jawa Barat yaitu, *Gemah Ripah Repeh Rapih*, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata *gemah-ripah* dan *repeh-rapih* merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

- Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
- Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai. (Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

3.1.4 Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Logo merupakan suatu identitas dari suatu lembaga ataupun organisasi adapun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

3.1.4.1 Arti Lambang

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo atau lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.

2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa

Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur**.**

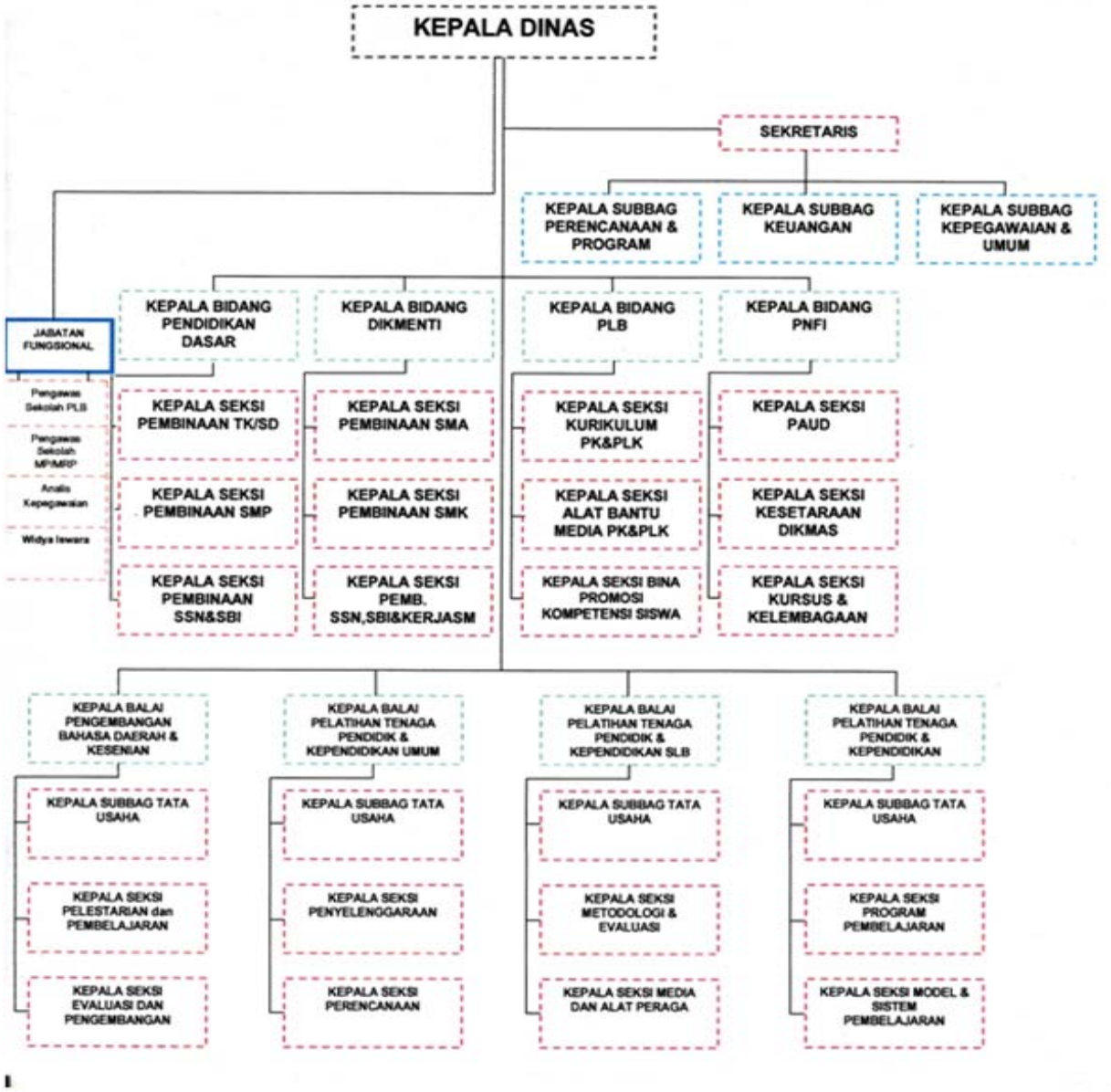
3.1.4.2 Arti Warna

Pada lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merah artinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

3.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Dikmenti, Kepala Bidang PLB, Kepala Bidang PNFI. Kemudian Sekretaris membawahi Kepala Subbag Perencanaan & Program, Kepala Subbag Keuangan dan Kepala Subbag Kepegawaian & Umum. Sub Bagian Kepegawaian Umum mempunyai sub dibawahnya yaitu Persuratan/Kearsipan, Kepegawaian, Poliklinik, Koperasi, Kendaraan, Humas & Hukum dimana penulis diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan, yang masing-masing sub bagian tersebut memiliki koordinator tersendiri didalamnya.

3.1.5.1 Pengurus Dinas Pendididkan Provinsi Jawa Barat

Adapun pengurus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengurus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA	Kepala Dinas
2.	Drs. Dedi Sutardi, M.Pd	Sekretaris
3.	Drs. H. Eef Saeful RF, M.Pd	Kepala Subbag Perencanaan & Program.
4.	Mumuh S, S.Pd.,M.Si	Kepala Subbag Keuangan.
5.	Drs. Diding Gusutardy, M.Pd	Kepala Subbag Kepegawaian

		&Umum.
6.	H. Dede Hasan K, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
7.	Drs. H. Moh. Edi Mulyadi, M.M.Pd	Kepala Bidang Dikmenti.
8.	Drs. Dede Suherlan	Kepala Bidang PLB.
9.	Drs. Edi Setiadi Erawan, M.Pd	Kepala Bidang PNFI.
10.	Drs. Yandi Darojat, M.Pd	Kepala Seksi Pembinaan TK/SD.
11.	Drs. Rudy Zukifli Nurdin, M.Pd	Kepala Seksi Pembinaan SMA.
12.	Drs. Dadang Ruhiyat, M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum PK&PLK.
13.	Drs. Dadang Sufyan S, M.Pd	Kepala Seksi PAUD.
14.	Ir. Yesa Sarwedi Hamiseno, M.Pd	Kepala Seksi Pembinaan SMP.
15.	Drs. Mamat Rahmat, M.AP	Kepala Seksi Pembinaan SMK.
16.	Pardomuan Pakpahan, S.Pd.,M.Pd	Kepala Seksi Alat Bantu Media PK&PLK.
17.	Drs. Yusuf, M.Pd	Kepala Seksi Kesetaraan DIKMAS.
18.	Endang Susilastuti, SE	Kepala Seksi Pembinaan SSN&SBI.
19.	Drs. Lilis Rosita, M.Si	Kepala Seksi SSN, SBI & Kerjasama DIKTI.
20.	Dra. Hj. Lia Embasari, M.Pd	Kepala Seksi Bina Promosi Kompetensi Siswa.
21.	Dra. Hj. Otin Martini, M.Pd	Kepala Seksi Kursus & Kelembagaan.
22.	Drs. Husen Rahadian Hasan, M.Pd	Kepala Balai Pengembangan

		Bahasa Daerah & Kesenian.
23.	Drs. Gunawan, M.Pd	Kepala Subbag Tata Usaha
24.	Drs. Casmadi	Kepala Seksi Pelestarian & Pembelajaran
25.	Drs. Amin Hermawan	Kepala Seksi Evaluasi & Pengembangan.
26.	Drs. H. Asep Suhanggan, M.M.Pd	Kepala Balai Pelatihan Tenaga Pendidik & Kependidikan Umum.
27.	Drs. H. Mulyana, M.Pd	Kepala Subbag Tata Usaha.
28.	Dra. Hj. Mimin Maryati, M.Pd	Kepala Seksi Penyelengaraan.
29.	Firman Adam, S.Pd.,M.M.Pd	Kepala Seksi Perencanaan.
30.	Drs. Kamarul Bahri, M.Pd	Kepala Balai Pelatihan Tenaga Pendidik & Kependidikan SLB
31.	Drs. Iyus Rozali	Kepala Subbag Tata Usaha
32.	Drs. H. Mastur B, M.M.Pd	Kepala Seksi Metodologi & Evaluasi.
33.	H. Dian Hendriana, S.Pd.,M.Pd	Kepala Seksi Media & alat Peraga.
34.	Drs. H. Nandang Djunaedi, M.M	Kepala Balai Pelatihan Tenaga Pendidik & Pendidikan Kejuruan.
35.	Drs. Asep Kurniadi, SE.,MM	Kepala Subbag Tata Usaha.
36.	Drs. Yuyu Wahyu Aji, M.Si	Kepala seksi Program Pembelajaran.
37.	Dr. H. Ahmad Margana, M.Pd	Kepala Seksi Model & Sistem Pembelajaran.

Sumber : Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3.1.5.2 Job Deskription Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD .
b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
e. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
f. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan dasar.
g. Seksi Pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan TK dan SD.

h. Seksi Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMP.

i. Seksi Pembinaan SSN dan SBI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN dan SBI.

j. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi.

k. Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.

l. Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMK.

m. Seksi Pembinaan SSN, SBI dan Kerjasama DIKTI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN/SKM, SBI dan kerjasama DIKTI.

n. Bidang Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan luar biasa.

o. Seksi Kurikulum PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kurikulum PK dan PLK.

p. Seksi Alat Bantu Media PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi alat bantu media PK dan PLK.

q. Seksi Bina Promosi Kompetensi Siswa mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi bina promosi kompetensi siswa.

r. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan non formal dan informal.

s. Seksi PAUD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan anak usia dini.

t. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.

u. Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kursus dan kelembagaan.

3.1.6 Sarana dan Prasarana

3.1.6.1 Sarana Dinas Pendidikan Povinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki sarana untuk menunjang aktifitas pekerjaan pegawai, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berada di Jalan Dr. Radjiman No.6 adapun sarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2012 antara lain :

- Memiliki Gedung / Kantor sebanyak 3 bangunan.
- Memilki Fasilitas Lapangan Upacara.
- Memiliki Fasilitas Lapangan Parkir Motor dan Mobil.

- Memiliki Mesjid Baitush Sholihin.
- Memiliki Fasilitas Olahraga Tennis Outdoor 2 lapang.
- Memiliki Ruangan Kesenian Daerah.
- Memiliki Ruangan Kantin pegawai.
- Memiliki ruang rapat (Humas & Hukum)

3.1.6.2 Prasarana Dinas Pendidikan Povinsi Jawa Barat

Prasarana yang dimiliki oleh bagian Humas dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Fasilitas Kerja yang digunakan oleh bagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

No	Nama sarana & prasarana kerja	Jumlah	Satuan	Penempatan
1	Lemari besi dua pintu	4	Unit	Humas
2	Laci besi	2	Unit	Humas
3	Meja kerja	8	Unit	Humas
4	Kursi putar	7	Unit	Humas
5	Kursi lipat	6	Unit	Humas
6	Ac	1	Unit	Humas
7	Dispenser	2	Unit	Humas
8	Mesin tik	1	Unit	Humas
9	Kamera	3	Unit	Humas
10	Handycam	1	Unit	Humas
11	Komputer/CPU	3	Unit	Humas
12	Monitor	3	Unit	Humas
13	Speaker	1	Unit	Humas

14	Printer	1	Unit	Humas
15	Pemotong kertas	1	Unit	Humas
16	Jam dinding	1	Unit	Humas
17	Cermin	1	Unit	Humas
18	Televisi	1	Unit	Humas
19	Gantungan Surat Kabar	1	Unit	Humas
20	Tempat Sampah	1	Unit	Humas

Sumber : Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kulitatif. Menutut Ardianto (2011:60) “Metode deskriptif-kualitatif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*)”. Peneliti terjun langsung kelapangan, bertindak sebagai pengamat. Membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian deskripitif ini ditujukan untuk mengumpulkan data, informasi secara aktual dan rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi.

Data dari wawancara akan dianalisis melalui analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk kualitatif dari bahan wawancara. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Disini mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati khususnya mengenai Strategi yang dilakukan oleh Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Peneliti mencari data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, karya tulis yang bersifat ilmiah, buku-buku yang relevan ataupun catatan perkuliahan, internet searching dan referensi lain yang menunjang yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan.

2. Internet Searching

Peneliti mencari data dengan melakukan searching secara *online* dan data yang diambil berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan.

3.2.2.1 Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainya

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008 : 180). Dalam wawancara peneliti mengadakan suatu komunikasi secara personal maupun kelompok dengan pihak-pihak yang dianggap mampu mengungkapkan data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan panca indra yang dimiliki. Selain dengan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi atau berbicara dengan orang lain, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk memahami lingkungan (Ardianto 2011:179). Peneliti melakukan pengamatan dari bulan Januari 2012 sampai Januari 2013 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik Purposive, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-

orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya).[5]

Menurut Sugiyono, pertimbangan memilih informan dalam penelitian kualitatif ini adalah misalnya "orang yang kita jadikan informan tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti" (2009:61).

Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.

3.2.3.1 Informan Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan dua tipe informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci.

Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah empat orang. Dua diantaranya merupakan informan kunci yang semuanya diambil dari divisi humas. Peneliti disini mengambil informan kunci pada bagian divisi

[5]http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik. di unduh pada hari Selasa, 20 Maret 2012, jam 14:02.

humas sendiri karena dua informan ini lebih mengetahui mengenai kliping diantaranya yaitu Bapak Jujun dan Ibu Atikah, karena beliau yang setiap harinya menilai dan membuat kliping-kliping tersebut.

Sedangkan untuk informan pendukung, peneliti mengambil diantaranya yaitu kepala subbag kepegawaian & umum dan staf kurikulum bidang PLB. Alasan pengambilannya ini adalah karena kedua informan ini memiliki pengetahuan dan sering menerima kliping-kliping yang telah disusun. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel informan kunci dan informan pendukung dibawah ini:

Tabel 3.3

Daftar Informan Kunci

No.	Nama	Jabatan
1.	Jujun Junardi, Amd	Pelaksana Humas
2.	Atikah Abdulah	Staf Humas

Sumber : Peneliti 2012

Tabel 3.4

Daftar Informan Pendukung

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Diding Gusutardy, M.Pd	Kepala Subbag Kepegawaian & Umum
2.	Tuteng Romani, S.E	Staf Kurikulum Bidang PLB

Sumber : Peneliti 2012

3.2.4 Teknik Analisa Data

Menurut Nasution (dalam Ardianto 2011 : 216-217), analisis data dalam penelitan kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan harus segera dituangkan dalam betuk tulisan dan dianalisis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti langkah berikut :

1. Meredukasi Data.

   Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan ini akan terus bertambah. Bila tidak dianalisis sejak awal, akan menambah kesulitan. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan "mentah" disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi diberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan.

2. Men-display data.

   Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat berbagai macam matriks,

grafik, *networks* dan *charts.* Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

   Sejak awalnya, peneliti berusaha mencari makna dari data yang dikumpulkannya. Untuk itu, mencari pola, hubungan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi, dari data yang diperoleh sejak awal mencoba mengambil kesimpulan.

4. Menganalisis data.

   Menganalisis data sewaktu pengumpulan data antara lain akan menghasilkan lembar rangkuman dan pembuatan kode pada tingkat rendah, menengah (kode pola) dan tingkat tinggi memo.

5. Membuat lembar rangkuman.

   Untuk memperoleh inti data, peneliti dapat bertantanya, siapa, peristiwa atau situasi apa,tema atau masalah apa yang dihadapinya dalam lapangan, hipotesis yang timbul dalam fikirannya. Pada kunjungnan berikutnya, informasi apa yang harus ditemukannya dan hal apa yang harus diberikan perhatian khusus.

6. Menggunakan matriks dalam analisis data.

   Matriks dapat memberikan bantuan yang sangat berguna dalam mengolah dan menganalisis data yang banyak dan terdiri dari membentuk matriks, memasukan matriks, memasukan data kedalam matriks dan menganalisis data matriks.

3.2.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan absah atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.(Sugiyono, 2005:270)

1. Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
2. Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
3. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi,atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (Sugiyono, 2005:270-274)

4. Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemerikasaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. (Moleong, 2007:334)
5. Analisis kasus negatif, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
6. Membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.(Sugiyono, 2005:275-276)

3.2.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung. Telp (022) 4264813, Fax (022) 4624881, website www.disdik.jabarprov.go.id.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan Penelitian dilakukan dilaksanakan terhitung dari bulan Januari 2012 sampai bulan Januari 2013. Di Divisi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Waktu dan Jadwal Penelitian

